



Media: Joglo Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 12 Agustus 2026

Halaman: 2

Dorong PJU Jadi Infrastruktur Jaringan Fiber Optik

Solusi Kabel Semrawut dan Genjot PAD

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* — DPRD Kota Yogyakarta mendorong Pemkot Yogyakarta segera mengoptimalkan tiang-tiang penerangan jalan umum (PJU) sebagai infrastruktur jaringan fiber optik berkonsep *smart pole*. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis mengatasi kabel semrawut sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di tengah tantangan kapasitas fiskal daerah yang kian menyusut.

Anggota Fraksi Partai Gerindra

DPRD Kota Yogyakarta, Marwoto Hadi mengatakan, tiang PJU merupakan Barang Milik Daerah (BMD) potensial karena tersebar hingga tingkat kampung. Namun, pemanfaatannya selama ini dinilai belum terlalu maksimal.

Oleh karena itu, Marwoto mendorong agar Pemkot segera mengoptimalkan ribuan tiang PJU sebagai tempat pemasangan jaringan fiber optik. Langkah tersebut menjadi solusi ganda untuk mengatasi kesemrawutan kabel udara di ruang publik sekaligus meningkatkan PAD guna memperkuat ruang fiskal kota.

"Pemanfaatan aset daerah berupa tiang PJU selama ini

belum maksimal karena hanya difungsikan sebagai sarana penerangan jalan, padahal menyimpan potensi ekonomi yang besar," ujar Marwoto, kemarin (11/8).

Anggota Komisi A itu menjelaskan, dengan skema kerja sama pemanfaatan aset, Pemkot berpeluang memperoleh berbagai potensi pendapatan. Mulai dari sewa aset, kontribusi tetap, hingga bagi hasil dari para operator telekomunikasi.

Dilema fiskal yang dihadapi Pemkot Yogyakarta saat ini memang cukup krusial. Selain adanya kecenderungan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat (TKD) pada tahun 2026, pemerintah



Marwoto Hadi
Anggota DPRD Kota Yogyakarta

daerah juga terhimpit mandat UU Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total

belanja daerah. Beban belanja pegawai yang tinggi, ditambah kewajiban pemenuhan PPPK, membuat ruang bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur publik di APBD menjadi sangat terbatas.

Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas fiskal daerah di lingkup DIY, termasuk Kota Yogyakarta, seringkali dikategorikan dalam level rendah. Upaya efisiensi belanja modal pun telah dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam menghadapi tren pemangkasan TKD. Oleh sebab itu, diversifikasi sumber pendapatan melalui optimalisasi aset menjadi krusial untuk menjaga kemandirian ekonomi kota.

Hasil dari optimalisasi aset tersebut nantinya dapat dikembalikan kepada masyarakat. Misalnya untuk pemeliharaan rutin PJU, pembangunan jaringan internet gratis hingga tingkat kampung, pengadaan CCTV keamanan lingkungan, serta penguatan sarana UMKM digital.

Di samping sebagai sumber pendapatan, Marwoto juga mengarahkan agar infrastruktur PJU bisa dikembangkan menjadi *smart pole* yang terintegrasi dengan CCTV, Wi-Fi publik, sensor lingkungan, hingga perangkat *Internet of Things* (IoT) guna mendukung terwujudnya *Smart City* di Kota Yogyakarta.

Supaya hal tersebut dapat

terwujud, ia berharap eksekutif segera membuat regulasi khusus, standar teknis instalasi, serta penetapan tarif sewa aset.

DPRD Kota Yogyakarta menyarankan Pemkot untuk mulai menyusun masterplan utilitas kota, menerbitkan aturan perizinan terpadu, dan mewajibkan pihak operator telekomunikasi menata ulang kabel-kabel yang semrawut.

"Kami optimistis dengan regulasi yang jelas dan kerja sama yang transparan, pemanfaatan aset daerah ini dapat menjadi inovasi strategis dalam mewujudkan tata kelola kota yang estetik, produktif, dan berdaya saing digital," tegasnya.

(eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005